

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### *1. Administrasi Pembangunan*

Administrasi Pembangunan terdiri dari dua kata Administrasi dan Pembangunan, yang di mana keduanya memiliki masing-masing pengertian juga telah umum diketahui bahwa yang dimaksud administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Siagian (2009 : 5) Administrasi pembangunan yaitu:

“Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.”

Juga menurut Mustopadidjaya dalam Afiffudin (2010 : 51) Pengantar administrasi pembangunan, mengatakan administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Masih dalam buku yang sama Riggs Administrasi pembangunan masih menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program, atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.

Melihat beberapa definisi sederhana di atas jika disimak secara cermat akan memunculkan ke permukaan tujuh ide pokok, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang satu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).

- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya

terjadi secara spontan, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

- c. pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka pendek.

Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.

Perubahan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara, bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya.

- e. Pembangunan mengarah modernitas.

Modernitas di sini diartikan antara lain sebagai cara hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.

- f. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multi dimensional.

Artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan bernegara, yang dapat menjangkau di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

- g. Pembangunan ditujukan pada usaha untuk pembinaan bangsa dan negara.

Tujuannya adalah supaya bangsa yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi Negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu

menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain di dunia.

Secara Implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional yang di maksudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bukan hanya tugas pemerintah dan tanggung jawab pemerintah saja namun dibutuhkan partisipan masyarakat meskipun harus diakui peran pemerintah cukup dominan.

Sebagai bentuk upaya dari pemerintah dalam administrasi pembangunan dibuatlah suatu aturan-aturan atau program. Program tersebut didasari oleh kebijakan yang bermanfaat kepada masyarakat guna mencapai tujuan bersama, sebagai contoh salah satu wujud tindak administrasi pembagunan dalam bidang pendidikan ialah pemerintah membuat suatu kebijakan atau program penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang dikenal juga penerimaan siswa baru secara online untuk mengefektifkan pendaftaran pendidikan pada setiap jenjang berkelanjutan.

## *2. Konsep Kebijakan*

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti politik, social, ekonomi, hukum dan psikologi. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam perkuliahan. Kebijakan publik (*public policy*) hadir dengan tujuan dan program-program tertentu, guna mengatur

kehidupan bersama. Definisi mengenai kebijakan publik di berikan oleh Robert Eyestone dalam Winarno (2008:20), ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan public didefenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Dye buku yang sama, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Anderson dalam Subarsono (2011:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik juga dapat dipengaruhi oleh para aktor swasta dan faktor dari luar pemerintah.

Menurut Carl J dalam Nawawi (2009:8) Kebijakan publik adalah:

“Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Sedangkan kebijakan publik menurut Parsons (2008 : 1) yaitu:

“Kebijakan public membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefenisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik”

Disisi lain Nugroho mengungkapkan (2014 : 43) bahwa kebijakan publik adalah produk yang memperjuangkan kepentingan publik, yang filosofinya adalah mensyaratkan partisipasi publik sejak awal hingga akhir.

Jika melihat dari beberapa pengertian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik ialah suatu aturan guna mengatur kepentingan bersama dengan maksud tujuan tertentu, dengan cara menyusun agenda aturan-aturan yang mengatur masyarakat sehingga membentuk suatu kebijakan yang biasanya dibuat oleh pemerintah atau sekelompok masyarakat. Kebijakan publik terkadang berangkat dari masalah yang timbul pada masyarakat dan masyarakat pula yang melaksanakannya, sehingga pemerintah membuat aturan-aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membentuk agenda-agenda yang terstruktur membentuk suatu kebijakan, hal tersebut guna mencapai ketentraman dan ketertiban bermasyarakat

Hal yang hampir sama dikemukakan menurut Dye dalam Subarsono (2011 : 2), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk penerapan kebijakan tersebut mulai dari penyusunan agenda sampai tahap pengevaluasian, seperti yang diungkapkan oleh MHowlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2011:13-14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan Kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor untuk dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

### 3. Konsep Implementasi

Implementasi yaitu suatu terapan atau pelaksanaan dari kebijakan, merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Implementasi yaitu Pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. (<http://kamusbahasaindonesia.org/implementasi>)

Menurut Mazmania dan Sabatier dalam buku (Solichin, 2011 : 68) Menyebutkan bahwa:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”.

Sementara itu Grindle juga memberikan pandangannya di terapkan dalam buku Winarno (2008 : 146) tentang tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*lingkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Disisi lain Grindle menyebutkan dalam buku Waluyo (2007 : 49) bahwa Implementasi yaitu:

“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Dengan demikian, Implementasi Kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran kedalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuannya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Meter dan Horn (Nawawi, 2009-131) mendefinisikan implementasi kebijakan: “Merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Dari defenisi Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk pencapaian tujuan yang dilakukan oleh individu dari berbagai latar belakang status atau pejabat-pejabat dan jajarannya sebagai pelaksana kebijakan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan hal-hal yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (2008 : 177) secara garis besar mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Perlu kiranya kita sadari bahwa mempelejari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang terjadi di lapangan sesudah suatu

program dirumuskan, yakni dampak yang terjadi setelah proses pengesahan legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun pada peristiwa.

Lowi, dalam buku Wahab (2008:182-189) Menyatakan bahwa tipe kebijakan yang dibuat membawa dampak tertentu terhadap tipe kegiatan politik,. Kebenaran pernyataan tersebut dapat diuji pada proses implementasi yaitu:

1. Munculnya perlawanan, dari pihak-pihak yang berkepentingannya yang terancam oleh tindakan-tindakan tersebut.
2. Manfaat Kolektif, dapat membangkitkan tuntutan-tuntutan bersema (bersifat kategoris), dan manfaat-manfaat yang dapat dibagi habis
3. Menyangkut perubahan, perilaku yang dikehendaki pada pihak yang menerima manfaat dari program tertentu adalah merupakan bentuk lain bagaimanaza isi kebijakan mempengaruhi implementasinya.
4. Letak atau posisi implementasinya, Konten/muatan dari berbagai kebijakan kerapkali juga menentukan letak dari pengimplementasiannya.
5. Semakin tersebar posisi implementasinya, baik secara geografis maupun secara organisatoris-administratif, maka semakin sulit pula tugas-tugas implementasi suatu program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari sebuah kebijakan memiliki dampak terhadap politik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Juga berdampak pada kebijakan yang dijalankan oleh suatu organisasi.

Dalam Pandangan Edward dalam Subarsono, (2011:90-92), Implementasi kebijakan di pengaruhi empat variable, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Kedua Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Ketiga Disposisi, adalah watak dari karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Dalam mengkaji Implementasi Kebijakan, Edwar menyebutkan ada empat faktor atau variable yang menentukan keberhasilan Implementasi kebijakan faktor-faktor atau variable tersebut adalah Komunikasi, Sumber-sumber, Kecendrungan-kecendrungan dan struktur birokrasi dalam Winarno (2012:177-206):

a. Komunikasi

Secara umum Edward dalam Winarno (2012:178-184), tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*):

1. Transmisi, Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Dalam mengimplementasikan suatu keputusan, harus di menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah di keluarkan.

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. *Pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini aka menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. *Kedua*, Informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti yang diketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarki, kondisi tersebut sangat mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. *Ketiga*, pada akhirnya komunikasi penangkapan komunikasi-komunikasi

mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

2. Kejelasan. Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya consensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembetukan kebijakan.

3. Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan, jika hal tersebut terjadi maka berakibat pada tidak efektifnya implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar

kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Kesimpulan, antara komunikasi dan implementasi, yakni semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada pelaksana kebijakan, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan kebijakan yang akan dilaksanakan. Maka dibutuhkan komunikasi yang jelas dan konsisten.

#### b. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasinya cenderung tidak efektif. Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber yang penting meliputi, staf yang ahli, informasi mengenai program, fasilitas fisik yang mendukung jalannya program Edward dalam Winarno (2012:178-184).

1. Staf. Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan, karena dengan adanya staf yang memadai serta staf yang profesional merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kurangnya keterampilan pengelolaan pada staf merupakan masalah besar yang dihadapi pemerintah daerah, hal ini disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan untuk latihan profesional

2. Informasi. merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksanaan-pelaksanaan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. *Bentuk kedua* dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
3. Wewenang. Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Karena tanpa adanya wewenang staf tak mampu berbuat apa-apa, wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Kewenangan dapat dipahami sebaik-baiknya kalau mengenal dua jalur di mana berbagai orang menggunakan metode kontrol. Pada *jalur pertama*, setiap kali bila seseorang ingin menggunakan berbagai metode kontrol, ia menerapkan berbagai metode kontrol (antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan di kontrol. Pada *jalur kedua*, pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja menggunakan metode-metode itu untuk membujuk orang-orang yang dikontrolnya agar mentaati peraturan yang ada bahwa mereka harus tunduk terhadapnya.
4. Fasilitas. Fisik sumber-sumber lain yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan, seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa

bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan mengenai sumber-sumber implementasi kebijakan adalah bahwa sumber-sumber kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

#### c. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal Edward dalam Winarno (2012:178-184).

Dampak dari kecenderungan-kecenderungan. Menurut Edward, banyak kebijakan masuk ke dalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-

pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Kecendrungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila para pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat dengan keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menanggukkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setuju dalam rencananya untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

Kesimpulan dari kecenderungan-kecenderungan, kebijakan-kebijakan yang masuk ke dalam zona ketidakacuhan bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substantive para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan yang tidak sesuai dengan kebijakan akan memuai hambatan-hambatan terhadap implementasi.

#### d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolehkti, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern.

Ripley dan franklin dalam Winarno (2008:205), berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam

karakteristik birokrasi, yaitu: *Pertama*, birokrasi di manapun berada, dipilih sebagai instrument social yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik. *Kedua*, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berdeda-beda untuk masing-masing tahap. *Ketiga*, birokrasi mempunyai tujuan yang berbeda. *Keempat*, fungsi birokrasi berada pada lingkungan yang luas dan kompleks. *Kelima*, birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi. *Keenam*, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar dirinya.

Pengaruh struktur organisasi bagi implementasi, struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Jadi keempat variable diatas sangat berperang penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan dalam tahap mengimplementasikannya. Empat Variabel

tersebut saling mempengaruhi satu sama lain demi tercapainya suatu program kebijakan dengan benar.

Implementasi Kebijakan memang merupakan proses kompleks. Namun implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan dan program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Dengan memahami beberapa model implementasi kebijakan diatas beserta faktor-faktor keberhasilan, diharapkan dapat membantu dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diprogramkan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga menurut Grindle dalam buku Agustino (2008:154), amat di tentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a. *Content Of Policy* menurut Grindle adalah :

1. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

*Interes Affecter* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan.

2. *Type of Benefit* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang

menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakn memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijkan.

5. *Program Implementer* (pelaksanaan program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaaannya berjalan dengan baik

b. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat

guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

2. *Institution and Regime Charaterictic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. *Compliance and Reponsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

Model Implementasi yang dikemukakan oleh Grindle tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih pada dari program tersebut, sehingga dapat menghasilkan perubahan dengan apa yang diharapkan.

#### 4. Sistem Informasi Manajemen

Berkembangnya ilmu dan teknologi yang pesat saat ini sangat membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Organisasi dipacu untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap dan akurat untuk menjadi suatu informasi yang digunakan sesuai kebutuhan organisasi tersebut. Dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen untuk mengelolah informasi tersebut.

Sistem informasi manajemen sendiri terdiri dari tiga kalimat yaitu sistem, informasi, manajemen. Satu persatu dapat di definisikan sebagai berikut :

Ludwig (Rochaety 2006 : 2) Mendefinisikan Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Budi Sutedjo (Rochaety 2006 : 2) menyebutkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan

Gie dalam buku Moekijat (1991 : 3) mengarti sistem sebagai suatu kebulatan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan menurut suatu pengaturan yang tertib guna mencapai maksud tertentu.

Dari definisi yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah seperangkat unsur atau elemen, bagian bagian saling berhubungan dan membentuk

satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam aplikasinya, suatu sistem dibentuk dengan suatu pengaturan yang tertib agar proses suatu sistem dapat terkoordinir dengan baik.

Definisi Informasi, Davis (1992 : 28) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Sedangkan Informasi Menurut Sutedjo dalam buku Rochaety (2006 : 4) menjelaskan informasi merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada

Jadi dari definisi dan penjelasan yang ada di atas maka informasi masih dapat di definisikan sebagai data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna dan penting sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang baik adalah informasi yang dapat memberi manfaat pada saat yang tepat atau ketika dibutuhkan.

Menurut Davis (1992 : 200) Informasi dalam lingkup sistem informasi, memiliki beberapa ciri :

1. Benar atau salah. Ini dapat berhubungan dengan realitas atau tidak. Bila penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama seperti yang benar.

2. Baru. Informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya
3. Tambahan. Informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan baru pada informasi yang telah ada.
4. Korektif. Informasi dapat menjadi suatu koreksi atas informasi salah satu palsu sebelumnya.
5. Penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada. Ini masih berguna karena meningkatkan persepsi penerimanya atas kebenaran informasi tersebut.

Nilai informasi ditentukan oleh lima karakteristik menurut Amsyah (1997:316-317), yaitu :

1. Ketelitian (accuracy), atau disebut juga akurasi dapat didefinisikan sebagai perbandingan dari informasi yang benar dari jumlah seluruh informasi yang di hasilkan pada suatu proses pengolahan data tertentu.
2. Ketepatan waktu (timeliness), artinya informasi cepat tersedia pada saat diperlukan. Jika suatu informasi itu akurat tapi diterima atau diketahuinya terlambat, tentu saja menjadi tidak berguna.
3. Kelengkapan (complete), informasi tidak hanya harus akurat dan tepat waktu, tapi harus juga lengkap agar tidak simpang siur.
4. Keringkasan (conciseness), suatu informasi harus langsung mengenai sasaran yang diperlukan dan jelas.

5. Kesesuaian (relevancy), informasi hendaknya sesuai dengan keperluan pekerjaan atau keperluan manajemen. Informasi juga harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Jika salah satu dari lima point karakteristik di atas tidak terdapat dalam suatu informasi, maka informasi tersebut dapat dikatakan sebagai informasi yang kurang baik, karena ketidak lengkapannya. Misalnya suatu informasi sudah teliti, kemudian kelengkapannya pun sudah sesuai, ringkas dengan sesuai kebutuhan, tapi jika pada saat kita membutuhkan informasi tidak tepat waktu, maka informasi tersebut akan menjadi tidak berguna.

Menurut Nugroho (2008 : 16) Informasi yang baik harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Akurat

Maksud akurat ialah informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bebas dari bias. Bebas dari kesalahan berarti bahwa informasi tersebut benar-benar menyatakan apa yang harus dinyatakan. Bebas dari bias bahwa informasi tersebut teliti

- b. Tepat waktu

Jelas informasi harus diberikan pada waktu yang tepat. Informasi yang sudah kedaluwarsa hanya bernilai sampah, sekalipun informasinya sama dan tidak berubah

c. Relevan

Artinya bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai kebutuhan pihak yang membutuhkan informasi. Misalnya, untuk menghitung dosis obat seorang pasien, dokter membutuhkan informasi mengenai berat badan pasien. Jadi, berat badan pasien adalah informasi yang relevan, sedangkan informasi tentang tinggi badan pasien bukanlah informasi yang relevan.

Secara umum Manajemen menejemen merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Namun menurut Stoner (1998 : 75) :

“mendefinisikan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, perngorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan antar anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan”

Menurut Waluyo (2007 : 5) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Pendapat dari buku Manajemen edisi ke dua Handoko (2003 : 9): Manajemen Melibatkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang telah di tetapkan (stated goals).

Jadi, Manajemen adalah suatu kegiatan mengelolah sumber daya baik manusia ataupun sumber daya lainnya yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan untuk mencapai tujuan bersama. jika diartika secara menyeluruh maka sistem informasi manajemen adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dan terintegrasi menghasilkan suatu informasi yang membantu proses kegiatan manajemen agar lebih efektif.

Kemudian Pengetian SIM Menurut Scott (2004 : 100) :

“Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manaher atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan”.

Pendapat yang lain, pada Davis (2002 : 3) sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Sedangkan dalam buku McLeod, JR dalam buku Sistem Informasi Manajemen, edisi kesembilan (2007 : 11):

“sistem informasi manajemen sebagai sistem berbasis kompter yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama, dengan informasi yang telah diolah menjadi data sehingga lebih bermakna.

Setyowati (2011 : 8) mendefinisikan :

“Sistem Informasi Manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan”.

### 3.1 Fungsi Sistem Informasi Manajemen

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen atau SIM, agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam buku Sistem Informasi Manajemen Setyowati (2011:9-12) Beberapa kegunaan/fungsi sistem informasi antaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi.
2. Menjamin tersedianya kualitas keterampilan dan memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif.
4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi.
5. Sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan.
6. Sistem informasi untuk pengendalian operasional.
7. Sistem informasi untuk pengendalian manajemen.
8. Sistem Informasi untuk perencanaan strategi

### 3.2 Manfaat Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Menurut Amsyah (1997:314-315):

“Manfaat sistem informasi manajemen adalah untuk memberi kejelasan dari sesuatu ketidakpastian atau untuk mengurangi ketidak pastian tersebut, sehingga manusia dapat membuat suatu keputusan dengan kepastian yang lebih baik dan menguntungkan”

### 3.3 Karakteristik Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Agar fungsi Sistem Informasi Manajemen dapat mencapai sasarannya, maka dalam pelaksanaannya perlu didasarkan pada karakteristik sistem informasi manajemen yang baik, sebagaimana dikemukakan prinsip-prinsip dalam sistem informasi manajemen menurut Scott (1997:100-102) antara lain :

1. Terintegrasi  
SIM melingkupi sistem informasi formal maupun informal, baik yang manual maupun berkomputer.
2. Terkoordinasi  
Informasi yang diperoleh antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain saling terkoordinasi sehingga informasi melewati dan menuju sub sistem yang diperlukan serta menjamin sistem informasi bekerja secara efisien.
3. Memiliki Sub-sistem Informasi  
Memiliki bagian-bagian dari keseluruhan sistem dan merupakan sistem yang terpadu.
4. Terintegrasi secara rasional  
Adanya keterpaduan antar sub-sub sistem sehingga membuat pemrosesan informasi menjadi efisien, akurat, dan relevan.
5. Mentransformasikan data ke dalam informasi  
Data-data yang diperoleh diolah untuk kemudian ditransformasi dengan berbagai cara sehingga menjadi informasi sesuai kebutuhan.
6. Meningkatkan produktivitas  
Sistem informasi manajemen dengan berbagai cara mampu meningkatkan produktivitas pada pegawai. SIM mampu melaksanakan tugas rutin seperti penyiapan dokumen secara efisien. SIM juga harus membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.
7. Sesuai dengan sifat dan gaya manajer / pemimpin

Sistem informasi manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dari personil yang akan menggunakannya, termasuk juga sumbangan yang diberikan oleh para manajer.

8. Menggunakan kriteria mutu yang telah ditetapkan  
SIM harus dirancang agar sesuai dengan toleransi terhadap validitas yang tinggi dan ketepatan informasi. Sistem informasi harus mampu memberikan umpan balik (*feed back*) tentang efisiensi dan efektivitas.

Adapun sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik menurut davis (1992:3) dalam bukunya adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras komputer, terdiri atas komputer (pusat pengolahan, unit masukan/keluaran, unit penyimpanan file) dan peralatan penyimpanan data.
2. Perangkat lunak Komputer
  - a) Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data, yang memungkinkan sistem pengoperasian sistem komputer.
  - b) Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan.
  - c) Program aplikasi yakni program yang secara spesifik dibuat untuk tiap aplikasi
3. Data base (Data yang terseimpan dalam media penyimpanan komputer).
4. Prosedur, komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi.
5. Petugas pengoprasian, seperti operator komputer, analisis sistem, pembuatan program, personalia penyimpanan data.

Karakteristik-karakteristik tersebut di atas tidak menjadi patokan suatu organisasi dalam menerapkan suatu sistem informasi manajemen, karena masih banyak karakteristik-karateristik lain yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam penerapannya. Dalam penerapannya, sistem informasi manajemen yang dijalankan seseuai dengan keadaan organisasi itu sendiri.

## 5. *Teknologi Informasi*

Teknologi Informasi (TI) merupakan sebutan lain dari teknologi komputer, yang di khususkan untuk pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi sebuah organisasi termaksud organisasi pendidikan. Teknologi informasi di Indonesia ini terus mengalami perkembangan baik dari bentuk, ukuran, kecepatan dan kemampuan untuk mengakses internet.

Menurut Sutedjo (2002 : 49), gelombang teknologi informasi yang berbasis internet berkembang melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Gelombang pertama,

Pemanfaatan TI difokuskan untuk peningkatan produktivitas dan memperkecil biaya. Bagi organisasi yang mulai menerapkan teknologi tersebut akan melakukan otomatisasi kegiatan rutinnnya, seperti surat-menyurat, slide persentasi, pembuatan table dan neraca. Aplikasi yang digunakan untuk antara lain Word, Excel, Power Point, dan Acces.

2. Gelombang Kedua

Teknologi informasi difokuskan untuk meningkatkan efektifitas pengguna peralatan komputer melalui pembangunan jaringan komputer. Jaringan ini dibangun dengan cara menghubungkan komputer-komputer dengan menggunakan kabel dan kartu jaringan sehingga printer, *harddisk*, dan peralatan lain dapat digunakan secara serempak. Jaringan ini dapat

menghemat biaya investasi dan mempercepat distribusi data dan informasi.

3. Gelombang ketiga

Teknologi Informasi difokuskan untuk menghasilkan keuntungan lewat pembangunan program sistem informasi. Seperti pada sebuah universitas membangun jaringan sistem informasi pelayanan administrasi akademik, sistem informasi pelayanan administrasi keuangan, maupun sistem informasi pelayanan umum, yang kesemuanya berbasis teknologi informasi dan menguntungkan bagi pihak universitas maupun mahasiswa yang dilayani

4. Gelombang keempat

TI difokuskan untuk membantu proses pengambilan keputusan dari data kualitatif. Seperti pembangunan sistem pendukung keputusan (*DSS/Decision Support System*) bagi penerimaan pegawai, penilaian prestasi pegawai, peningkatan jenjang karier pegawai dan lain sebagainya (*back office*).

5. Gelombang kelima

TI difokuskan untuk meraih pelanggan (konsumen) melalui pengembangan jaringan internet. Membangun eksplorasi besar-besaran terhadap internet. Maka dalam hal ini lahirlah dalam dunia bisnis apa yang disebut *electronic business (e-business)* dan *e-commerce*. Dalam sistem pendidikan berbasis internet, apa yang disebut *e-learning*, *e-campus*, *e-*

*school* yang mampu menjangkau para pengguna jasa pendidikan baik lokal, nasional, maupun global

#### 6. Gelombang keenam

TI yaitu mengembangkan sistem jaringan tanpa kabel (*wireless*). Sistem tersebut memungkinkan seseorang mengakses internet melalui komputer yang terhubung ke telepon selular. Bahkan internet dapat diakses langsung lewat ponsel. Gelombang inovasi ini menunjukkan bahwa TI dapat digunakan untuk komunikasi efektif dengan konsumen dan mitra kerjanya.

#### 6. *Pengertian PPDB ONLINE*

PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SD, SMP, SMA, dan SMK dan SMK Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer. Hasil seleksi otomatis online internet dan melalui *Short Message Service* (SMS) setiap waktu. Untuk itu dijelaskan manfaat PPDB yaitu : PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.

Juga pelaksanaan PPDB memiliki prinsip : (a) Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi, (b) tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali juga daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan

ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir, (c) sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya, ke sekolah negeri atau swasta.

Serta pelaksanaan PPDB memiliki azas : (a) Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan, (b) Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik, (c) Akuntabel, artinya penerimaan pesertan didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya, (d) Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu menurut Buku Panduan Standar Operasional Prosedur PPDB tahun 2014.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses kegiatan penerimaan calon peserta didik baru memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sistem online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer, hasil seleksi dapat di akses setiap waktu secara online pada situs internet. [www.makassar.siap-ppdb.com](http://www.makassar.siap-ppdb.com). Hasil dari proses seleksi ditampilkan langsung dan terbuka (transparan) secara online melalui situs tersebut kepada masyarakat luas, khususnya siswa dan orang tua siswa. Sehingga PPDB online dapat dinikmati masyarakat sebagai suatu bentuk konkret pemerintah (dalam hal dinas pendidikan dan

kebudayaan) untuk memberikan pelayanan pendidikan secara terpadu, obyektif dan transparan.

Utamanya bagi pihak sekolah, tidak perlu menyaring nilai-nilai yang masuk yang tentu saja amat melelahkan karena perhitungan proses penyaringan dilakukan sepenuhnya oleh komputer yang telah diprogram sesuai aturan yang berlaku sehingga menjamin keakurasian dan obyektifitas hasil penerimaan siswa masing-masing sekolah. Apalagi dengan layanan data terpadu yang melibatkan banyak sekolah tingkat SMA dan SMK akan sangat membantu orang tua siswa agar tidak pergi kesetiap sekolah pilihannya, mereka tinggal duduk didepan komputer yang memiliki koneksi internet baik milik pribadi maupun melalui warnet (warung internet) untuk mengamati perkembangan terakhir penerimaan putra/putrinya.

Bagi para calon siswa baru terdapat lima macam metode pelaksanaan yang bias mereka tempuh, pelaksanaan penerima peserta didik baru (PPDB) online dilaksanakan melalui: (a) Jalur regular, yaitu sistem seleksi yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, (b) Jalur prestasi, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang ilmu pengetahuan, olah raga dan seni, (c) Jalur inklusi, yaitu jalur yang khusus diperuntukkan bagi calon peserta didik penyandang tuna daksa, (d) Jalur keluarga prasejahtera, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari masyarakat atau orang tua prasejahtera, (e) Jalur domisili, yaitu

jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah.

## B. Definisi Konsep

Untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online pada SMK Negeri 2 Makassar, maka peneliti merasa dimensi yang cocok dengan topik adalah Implementasi kebijakan yang di paparkan oleh Grindle dalam buku Leo Agustino (2008:154) yaitu,.

### 1. Isi kebijakan adalah :

#### a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingi diketahui.

#### b. Tipe manfaat

Pada poin ini tipe manfaat berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

#### c. Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan juga yang mendukung pada tahap pelaksanaan.

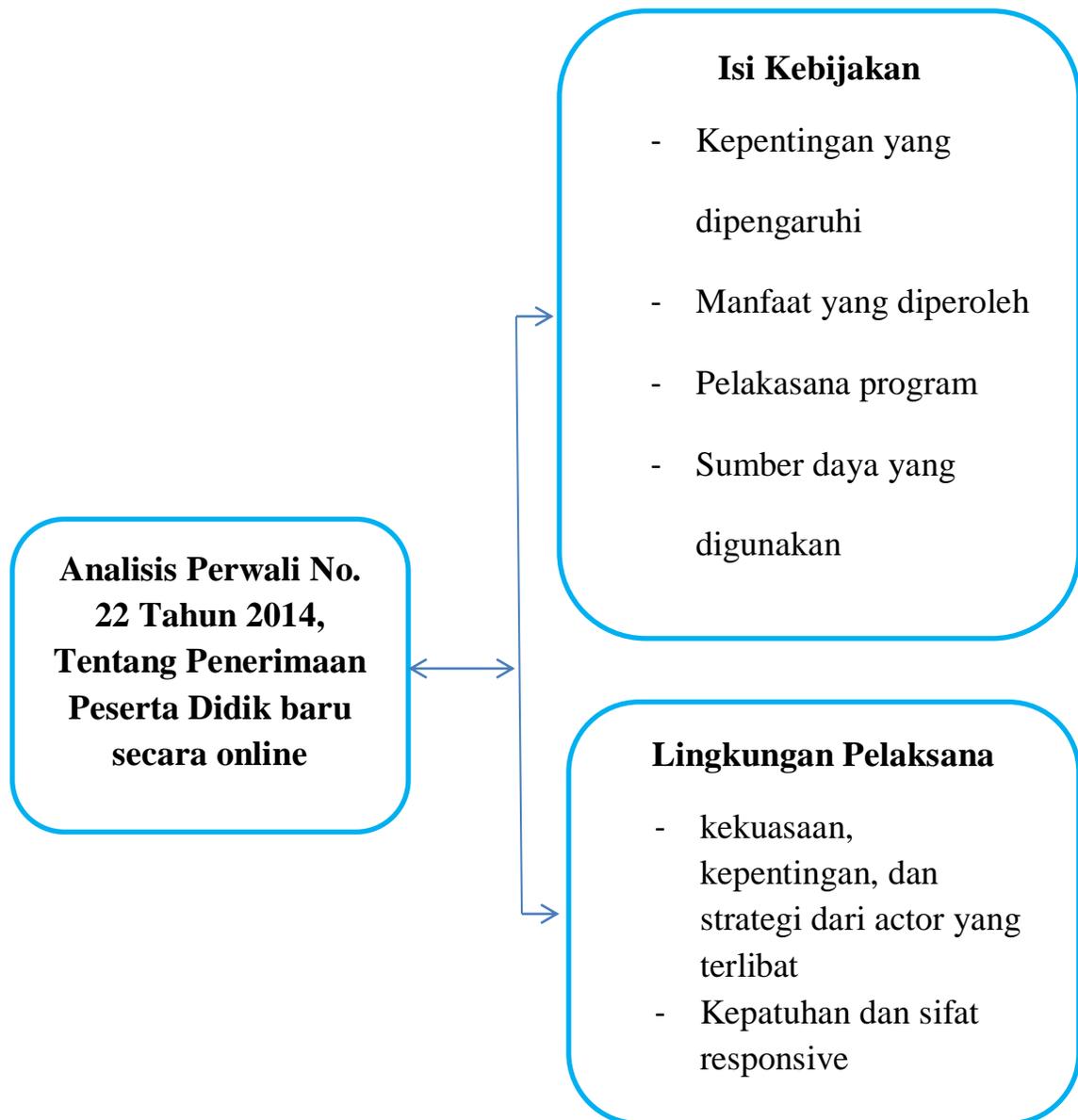
#### d. Sumber-sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

2. Lingkungan Pelaksana adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat  
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.
- b. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana  
hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakn adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menganggapi suatu kebijakan.

### C. Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian, Grindle 1980 dalam buku Nugroho “Public Policy” (2009:510)

**D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilihat dari aspek isi kebijakan ?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilihat dari aspek lingkungan pelaksana kebijakan ?